

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI WILAYAH SARBAGITA PROVINSI BALI

Putu Arinda Krisnayanthi ¹

Ni Luh Karmini ²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali,
Indonesia

ABSTRAK

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah, adanya pajak daerah dapat membantu pemerintah daerah untuk membiayai pengembangan daerahnya masing – masing. Wilayah Sarbagita Provinsi Bali menjadi wilayah yang memiliki penerimaan pajak daerah tertinggi diantara kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, jumlah penduduk, dan produk domestik regional bruto terhadap pajak daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali secara parsial dan simultan serta menganalisis ramalan penerimaan pajak daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali pada tahun 2019 – 2023. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah uji regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, variabel jumlah kunjungan wisatawan, jumlah penduduk, dan produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Secara parsial, variabel jumlah kunjungan wisatawan, jumlah penduduk, dan produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Hasil analisis tren menunjukkan bahwa ramalan penerimaan pajak daerah dari tahun 2019 sampai tahun 2023 akan terus meningkat

Kata Kunci: *jumlah kunjungan wisatawan, jumlah penduduk, produk domestik regional bruto, pajak daerah*

ABSTRACT

Local taxes are contribution to the region, the existence local taxes can help governments to finance development of their respective regions. Sarbagita Region has the highest regional tax revenue among other districts in Province of Bali. Purpose this study to analyze the influence number of tourist visits, population, and gross regional domestic product on regional taxes in the Sarbagita Region of Bali Province partially and simultaneously and analyze the forecast of local tax revenue in the Sarbagita Region of the Province of Bali in 2019 - 2023. Data used is secondary data. Analysis technique used multiple linear regression test. The results showed that simultaneously, the variable number of tourist visits, total population, and gross regional domestic product had a significant effect on local taxes in the Sarbagita Region of the Province of Bali. Partially, the variable number of tourist visits, population, and regional gross domestic product has a positive and significant effect on local taxes in the Sarbagita Region of the Province of Bali. The results of the trend analysis indicate that the forecast of local tax revenue from 2019 to 2023 will continue to increase

Keywords: *number of tourist visits, total population, gross regional domestic product, local tax*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan perkembangan global. Penyelenggaraan pemerintah dan pembiayaan pembangunan, pemerintah berusaha untuk menggali dana, baik dengan dana yang berasal dari masyarakat ataupun dari pemerintah sendiri. Pemerintah daerah sama halnya dengan pemerintah pusat, mempunyai kepentingan yang sama dalam menyelenggarakan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. Pembangunan ekonomi dalam konteks keberlanjutan, harus disertai dengan pengelolaan lingkungan dan kemajuan sosial sehingga dapat dipertahankan untuk generasi mendatang (Kurniawan dan Managi, 2018).

Daerah kabupaten/ kota pada saat ini diberikan keleluasaan dari pemerintah untuk mengatur urusan rumah tangganya. Bermula dari pemberlakuan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah merubah sistem pemerintahan khususnya di bidang pendanaan dari yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi daerah akan lebih mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal. Desentralisasi diperlukan untuk mempertahankan sebagai bagian dari bangsa yang kaya akan sumber daya (James Alm et al, 2001). Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dan tata kelola keuangan dari pemerintah pusat ke daerah dapat memberi ruang kepada daerah untuk meningkatkan ekonomi sesuai dengan potensi yang dimiliki (Kusuma, 2016).

Desentralisasi fiskal di Indonesia berusaha untuk mempromosikan pemerataan dengan memberikan pemerintah pusat dan kabupaten – kabupaten dengan intensif untuk pengembangan pembangunan (Irawan, 2015). Gustav dan Frances (1994) menyimpulkan bahwa dampak

keseluruhan dari desentralisasi adalah pemerintah daerah cenderung memberikan prioritas yang lebih tinggi untuk tujuan sosial dan infrastruktur ekonomi daripada pemerintah pusat. Adanya desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi sektor publik (Andreas dkk, 2013), dan desentralisasi dipandang sebagai mekanisme untuk membuat kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan untuk melibatkan penduduk lokal dalam proses pemerintahan demokratis (Oates, 1993).

Praktek desentralisasi di Indonesia mulai menunjukkan hasil positif, yang ditandai dengan kecenderungan menurun disparitas regional dan fragmentasi spasial (Tessa dkk, 2019). Adanya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah telah diberikan kewenangan untuk membuat pajak dan biaya baru (Blane, 2003). Menurut Rondinelli dkk (1989) pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan umum, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip transparansi. Pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan efek pendapatan, yaitu meningkatkan pendapatan, menciptakan peluang kerja, dan menghasilkan efek pengganda yang dihasilkan dari peningkatan pendapatan (Permadi, 2018). Pertumbuhan ekonomi dicapai dengan jalan desentralisasi fiskal atau pendelegasian wewenang oleh pusat kepada daerah untuk mengatur rumah tangga pemerintahan daerahnya sendiri atau sering disebut dengan otonomi daerah (Oates, 1993).

Pada era otonomi, daerah diberi wewenang lebih dominan untuk mengurus daerah sendiri, baik itu dari sisi kebijakan pembangunan dan mengelola keuangan sendiri (Muhammad Fajrii, 2016). Otonomi daerah adalah sistem yang memberi keleluasaan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk merencanakan, menentukan prioritas dan melaksanakan pembangunan daerah sesuai kondisi dan kemampuan daerahnya (Uppun, 2006). Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Hal ini berarti

daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber – sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan daerahnya. Kebijakan otonomi daerah itu dimaksudkan untuk semakin semakin mendekatkan pemerintah kepada masyarakatnya agar pelayanan yang diberikan semakin baik (Suartha, 2016).

Pemerintah daerah dalam melaksanakan rumah tangganya memerlukan sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena bagi suatu daerah sumber pendapatan menjadi tiang utama penyangga kehidupan daerah (Eko Caraka, 2019). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh dari penerimaan sektor pajak daerah, retribusi daerah, harus perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang disahkan (Mardiasmo, 2002;132).

Undang – undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sumber pendapatan asli daerah diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah tercantum dalam Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (18).

**Tabel 1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun
2014 – 2017 (Ribu Rupiah)**

Kabupaten /Kota	Pendapatan Asli Daerah (Ribu Rupiah)			
	2014	2015	2016	2017
Jembrana	89.349.645	98.032.646	114.533.487	121.342.475
Tabanan	273.426.482	300.799.021	318.083.799	426.635.751
Badung	2.722.625.563	3.001.464.263	3.563.459.640	4.172.457.396
Gianyar	424.472.546	45.721.018	529.864.618	662.753.475
Klungkung	98.837.766	120.035.996	134.142.054	153.210.776
Bangli	76.141.461	87.731.141	104.829.402	104.592.163
Karangasem	239.425.005	243.125.914	318.083.799	198.575.057
Buleleng	219.682.330	293.038.467	282.113.900	455.195.426
Denpasar	698.739.758	776.214.149	807.050.192	1.008.710.712
Provinsi Bali	2.920.416.697	3.041.266.607	3.041.195.258	3.398.472.278

Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Bali,2019

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Bali yang ditunjukkan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap kabupaten/ kota yang ada di Bali memiliki jumlah yang jauh berbeda antar kabupatennya. PAD tertinggi dihasilkan oleh Kabupaten Badung dari tahun 2014 sampai tahun 2017, diikuti oleh PAD Kota Denpasar menghasilkan PAD kedua tertinggi diantara kabupaten/kota di Bali. PAD terendah diperoleh oleh Kabupaten Bangli dari tahun 2014 sampai tahun 2017, PAD terendah selanjutnya dihasilkan oleh Kabupaten Jembrana. Tabel ini memperlihatkan ketimpangan yang terjadi pada masing – masing daerah di Provinsi Bali, yang disebabkan oleh adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki dan pembangunan yang masih belum seimbang pada masing – masing kabupaten/kota.

Bali dibagi menjadi empat sistem perwilayahan berdasarkan kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah yang mencakup: system wilayah Bali Utara yang terdiri dari Kabupaten Buleleng dengan pusat kawasan Perkotaan Singaraja, system wilayah Bali Timur yang terdiri dari Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Bangli

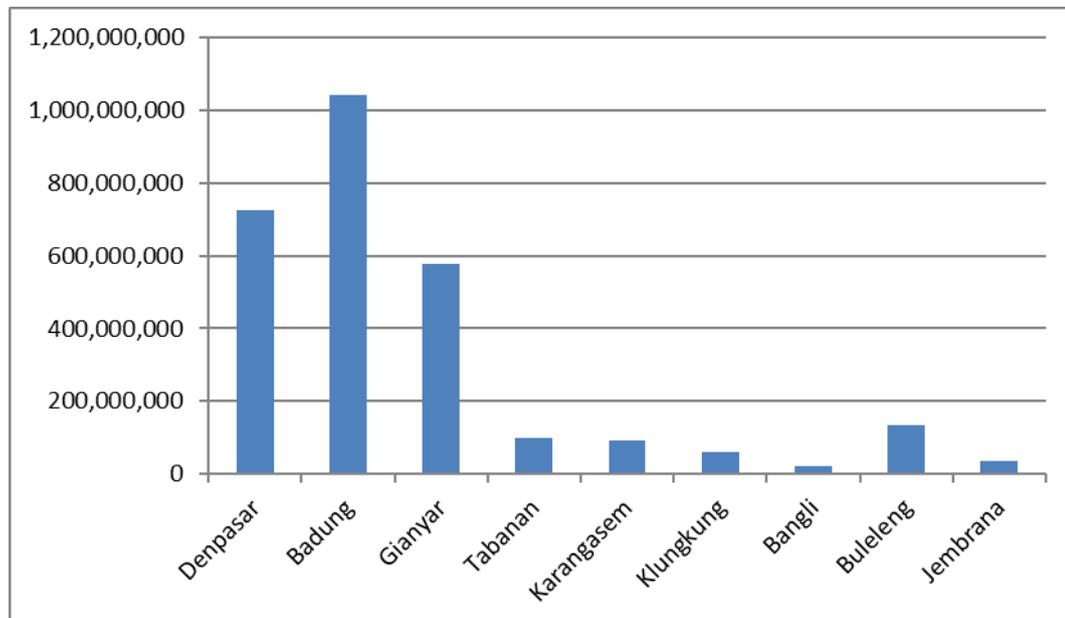
dengan pusat kawasan Perkotaan Semarapura, system wilayah Bali Selatan yang mencakup Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan dengan pusat kawasan Perkotaan Denpasar, system wilayah Bali Barat yang terdiri dari Kabupaten Jembrana dengan pusat kawasan Perkotaan Negara (Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009).

Kawasan Sarbagita merupakan wilayah metropolitan di Provinsi Bali yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 dimana peraturan tersebut menjelaskan bahwa kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Sarbagita adalah satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Denpasar dan Kawasan Perkotaan Kuta sebagai kawasan perkotaan inti. Pembagian wilayah dalam suatu kawasan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan wilayah.

Menurut Indra dan Yadnya (2018) dalam penelitiannya yang menganalisis sektor unggulan di wilayah Sarbagita, sektor yang menjadi unggulan di wilayah Sarbagita pada periode 2014 – 2016 yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor jasa pendidikan, sektor penyedia akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor industri pengolahan, dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Sektor – sektor unggulan yang dimiliki oleh masing – masing daerah Kabupaten/Kota merupakan kekuatan dan daya saing daerah dalam meningkatkan perekonomian daerahnya (Mahmudi, 2009:49). Upaya lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomiannya dengan peningkatan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah.

Pemerintah Indonesia baru saja menyelesaikan reformasi utama dari perpajakan nasional dengan melakukan pemungutan pajak daerah oleh daerah provinsi dan kabupaten / kotamadya (Nick, 1988). Pengaruh ekonomi terhadap upaya pemungutan pajak daerah cukup signifikan, untuk meningkatkan upaya penerimaan daerah pemerintah pusat harus membiarkan pemerintah setempat memiliki lebih banyak otonomi dalam pemungutan pajak (Weibo dan Qinghua, 2017). Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat terwujud (Sugianto 2008:1).

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat (Undang – Undang No, 28 Tahun 2009).



Sumber: Badan Pusat Statistika, 2020

Gambar 1 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali Tahun 2018

Gambar 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar memiliki penerimaan pajak daerah tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Sarbagita Provinsi Bali memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola keuangan daerahnya. Sumber dari pajak daerah di Wilayah Sarbagita adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak parkir.

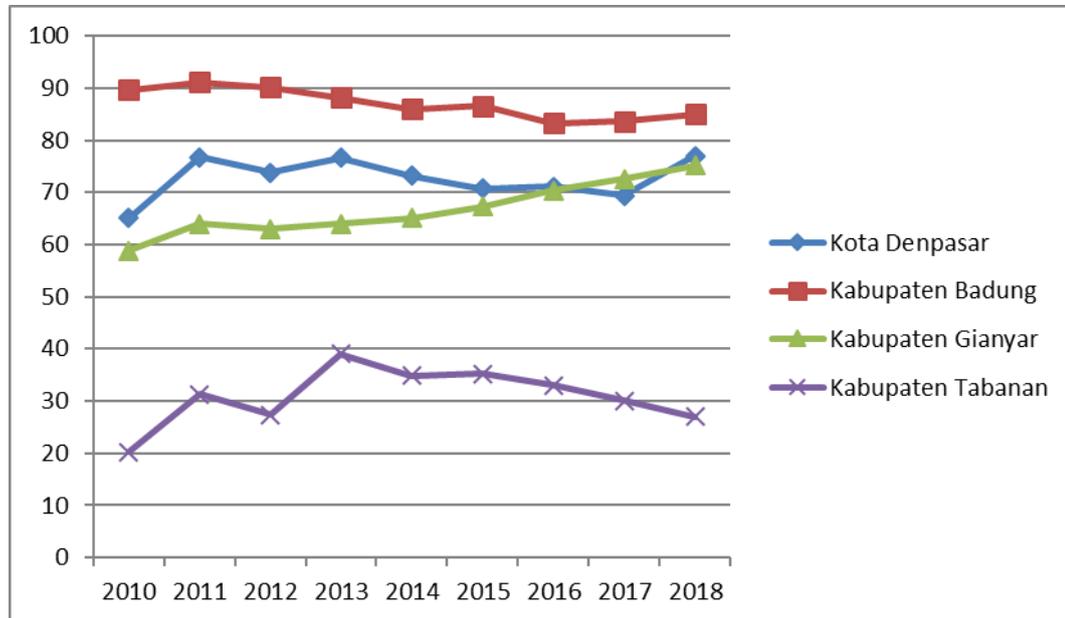
Tabel 2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Wilayah Sarbagita (juta rupiah) Tahun 2010 – 2018.

Tahun	Denpasar	Badung	Gianyar	Tabanan
2010	169.581,4	877.353,4	90.318,9	23.703,4
2011	326.282,4	781.693,4	133.959,8	27.486,2
2012	377.247,6	685.560,8	159.636,6	50.214,0
2013	504.981,6	810.554,3	204.436,6	99.762,3
2014	511.041,4	939.332,9	276.604,0	95.414,7
2015	549.363,0	1.098.718,1	307.668,6	105.793,0
2016	574.258,3	1.068.155,0	372.927,6	105.186,6
2017	700.341,2	1.090.156,2	392.810,3	128.176,1
2018	723.755,1	1.042.911,8	578.938,9	97.930,0

Sumber: Bapenda wilayah Sarbagita, 2019

Tabel 2 menunjukkan bahwa pajak daerah di keempat kabupaten/kota ini mengalami peningkatan pada setiap tahunnya dari tahun 2010 hingga tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah di wilayah Sarbagita memiliki upaya masing – masing untuk meningkatkan Pendapatan daerahnya melalui pajak daerah. Namun, besaran pajak daerah di masing – masing kabupaten/kota di wilayah Sarbagita berbeda, hal ini disebabkan oleh perbedaan potensi yang dimiliki untuk menunjang penerimaan pendapatan dari pajak daerah pada daerahnya. Pajak daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah, maka pada setiap daerah

memiliki kontribusi pajak daerahnya pada pendapatan asli daerah yang dimiliki.



Sumber : Badan Pusat Statistika, 2019

Gambar 2 Kontribusi Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Sarbagita Tahun 2010 – 2018.

Gambar 2 menunjukkan bahwa besarnya kontribusi pajak daerah pada pendapatan asli daerah di wilayah Sarbagita pada tahun 2010 hingga tahun 2018. Kota Denpasar menunjukkan kontribusi dari pajak daerah pada pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dan penurunan seperti Kabupaten Tabanan juga mengalami peningkatan dan penurunan, sedangkan Kabupaten Gianyar menunjukkan kontribusi dari pajak daerah pada pendapatan asli mengalami peningkatan di setiap tahunnya dari tahun 2010 hingga tahun 2018. Permasalahan utama yang terjadi adalah kontribusi pajak daerah pada pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung mengalami penurunan pada setiap tahunnya, sedangkan menurut Indra dan Yadnya (2018) sektor unggulan dari Kabupaten Badung adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, yaitu sebesar Rp 8.142.314,5 pada tahun

2016 dan Rp 8.821.928,3 pada tahun 2017 (BPS, Kabupaten Badung Dalam Angka 2018). Maka sektor penyedia akomodasi dan makan minum secara langsung akan dapat meningkatkan pajak hotel dan pajak restoran yang dapat membantu peningkatan dari pajak daerah yang dimiliki.

Pajak hotel subjeknya adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel dengan dasar pengenaan adalah jumlah pembayaran pada saat terjadinya transaksi (UU No. 28 Tahun 2009). Tamu yang menginap di hotel baik wisatawan maupun penduduk dapat menjadi subjek dari pajak hotel. Pajak restoran subjeknya adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran dengan dasar pengenaan adalah jumlah pembayaran yang diterima restoran (UU No. 28 Tahun 2009). Konsumen dari restoran adalah penduduk maupun wisatawan yang sedang berkunjung di wilayah tersebut. Pajak hiburan subjeknya orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan dengan dasar pengenaan jumlah uang yang diterima oleh penyelenggara hiburan (UU No. 28 Tahun 2009). Salah satu motif wisatawan melakukan perjalanan wisata adalah untuk menikmati hiburan dalam objek wisata, maka jumlah pengunjung objek wisata menjadi subjek dari pajak hiburan.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pajak daerah, menurut Tahwin (2013) faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah adalah jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung. Menurut Marliyanti dan Arka (2014) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh secara langsung terhadap Pajak Daerah di Kota Denpasar. Menurut Sania dkk (2018) jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak daerah di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah. Setiap daerah memiliki potensi yang dapat menjadi faktor pendorong dalam peningkatan pajak daerah yang dimiliki.

Provinsi Bali merupakan tujuan wisata Indonesia timur yang dikenal sampai mancanegara, setiap kabupaten/ kota memiliki keunikan tersendiri dengan budayanya masing – masing untuk ditawarkan kepada para pengunjungnya. Berbagai pesona wisata yang ditawarkan, Bali mampu memikat wisatawan baik asing maupun domestik, sehingga mampu menjadi Bali adalah penyumbang utama terhadap jumlah wisman nasional. Sektor unggulan yang dimiliki oleh Provinsi Bali adalah sektor pariwisata. Pariwisata adalah kegiatan yang melibatkan sejumlah besar bisnis ritel dan jasa (Ardahaey,2011).

Tabel 3 Kunjungan Wisatawan ke Bali Tahun 2010-2018

Tahun	Domestik	Mancanegara	Total
2010	4.646.343	2.576.142	7.222.485
2011	5.675.121	2.826.709	8.501.830
2012	6.063.558	2.949.332	9.012.890
2013	6.976.536	3.278.598	10.255.134
2014	6.394.307	3.766.638	10.160.945
2015	7.147.100	4.001.835	11.148.935
2016	8.643.680	4.927.937	13.571.617
2017	8.735.633	5.697.739	14.433.372
2018	9.757.991	6.070.473	15.828.464

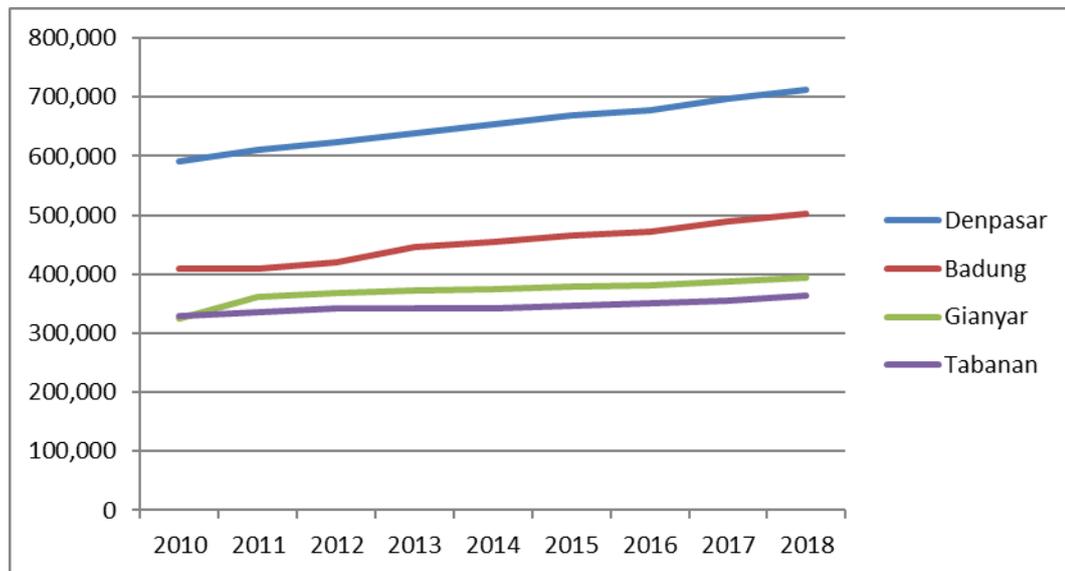
Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2020

Tabel 3 menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali cenderung meningkat di setiap tahunnya. Terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan domestik pada tahun 2014, menurut Sumut.antaranews (2015) hal ini disebabkan oleh dampak kebijakan pemerintah Joko Widodo yang melarang pejabat pengusaha angkutan wisata rapat di hotel. Setelah tahun 2014, kunjungan wisatawan ke Bali meningkat hingga tahun 2018.

Kunjungan wisatawan memiliki pengaruh yang sangat berarti untuk pengembangan industri pariwisata dan peningkatan pendapatan asli daerah

sehingga wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara tertarik untuk berkunjung (Rantetadung, 2012). Booming pariwisata Bali sebagian besar diprakarsai oleh mereka yang berada di luar Bali (Bendesa dan Sukarsa, 2012). Gde Penerimaan industri pariwisata salah satunya dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang dikelola oleh masing – masing daerah. Pajak hotel dan restoran merupakan besaran pajak yang wajib dibayarkan oleh pihak hotel dan restoran atas pelayanan yang diberikan kepada pihak pemerintah daerah, pajak hotel dan restoran ini akan masuk ke dalam penerimaan pajak daerah. Ana Pertiwi (2017) menyatakan bahwa jumlah kunjungan wisatawan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka secara tidak langsung berdampak pada meningkatnya pajak hotel dan restoran yang merupakan bagian dari pajak daerah.

Perkembangan jumlah penduduk usia kerja juga dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, karena seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk pada suatu daerah maka dapat berpotensi meningkatkan wajib pajak sehingga nantinya penerimaan pajak daerah juga meningkat (Saputra dkk, 2014). Sehingga dengan bertambahnya jumlah penduduk usia kerja akan berdampak langsung pada penerimaan pajak daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Sania dkk (2018) menyatakan adanya pengaruh positif variabel jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.



Sumber: Badan Pusat Statistika, 2019

Gambar 3 Perkembangan Jumlah Penduduk Usia Kerja di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali Tahun 2010 – 2018

Gambar 3 menunjukkan perkembangan jumlah penduduk usia kerja, yaitu penduduk yang berumur 15 tahun ke atas semakin tahun semakin meningkat. Maka dengan hal tersebut, subjek pajak terus bertambah dan dapat membantu meningkatkan realisasi dari penerimaan pajak daerah yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota di Wilayah Sarbagita.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang selalu diusahakan oleh pemerintah di negara berkembang (Kaur dan Singh, 2016). Peningkatan PDRB tidak terlepas dari dampak meningkatnya aktivitas ekonomi. Seiring dengan meningkatnya standar hidup maka golongan masyarakat yang berpenghasilan tinggi akan semakin meningkat juga, sehingga hal ini dapat menyebabkan peningkatan pada penerimaan pajak daerah. Peningkatan ini dikarenakan oleh sektor – sektor pajak daerah yang ada dalam PDRB (Shiska dan Nizaruddin, 2010). Tingkat PDRB suatu daerah berbeda dengan

daerah yang lain. Hal ini disebabkan karena berbedanya potensi perekonomian dan tenaga ahli yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Tabel 4 PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten/Kota di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali Tahun 2018 (miliar rupiah).

Kategori PDRB	Denpasar	Badung	Gianyar	Tabanan
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	3464,84	3449,23	2127,66	3150,62
Pertambangan dan penggalian	0,00	160,43	261,31	168,56
industri pengolahan	3257,33	2106,18	2132,02	858,77
pengadaan listrik dan gas	274,05	155,55	19,09	14,9
pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah & daur ulang	130,31	128,23	26,33	26,57
konstruksi	4971,09	5008,41	2105,99	1519,63
perdagangan besar & eceran	4801,26	3646,38	1480,26	1344,28
transportasi dan pergudangan	1533,42	14732,47	186,46	267,69
penyediaan akomodasi & makan minum	14715,17	16564,22	4026,58	2841,73
informasi dan komunikasi	2184,89	3157	1431,58	1069,32
jasa keuangan dan asuransi	2967,01	1383,6	696,21	508,52
real estat	2042,04	1820,53	868,38	846,9
jasa perusahaan	952,71	385,1	215,97	154,18
administrasi pemerintahan, pertahanan & jaminan sosial	2510,58	1885,76	1017,55	1200,49
jasa pendidikan	5709,91	1725,29	451,61	292,54
jasa kesehatan & kegiatan	1182,75	737,76	647,86	381,04
jasa lainnya	743,20	437,69	336,38	305,84

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2020

lasi & makan

minum memberikan sumbangan yang besar terhadap PDRB keempat kabupaten/kota di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali, dengan hal ini secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah terutama penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut; 1) Menganalisis pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, jumlah penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) secara simultan terhadap pajak daerah di wilayah Sarbagita Provinsi Bali. 2) Menganalisis pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, jumlah penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara parsial terhadap pajak daerah di wilayah Sarbagita Provinsi Bali. 3) Menganalisis tren pajak daerah di wilayah Sarbagita Provinsi Bali tahun 2019 – 2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di wilayah Sarbagita yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan. Alasan memilih wilayah Sarbagita karena di wilayah Sarbagita memiliki penerimaan pajak daerah dan pendapatan daerah yang tergolong tinggi dibandingkan dengan wilayah di luar Sarbagita. Objek penelitian ini adalah melihat faktor – faktor yang mempengaruhi pajak daerah yaitu melihat pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, jumlah penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap pajak daerah di wilayah Sarbagita.. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Bali, Badan Pusat Statistika Kota Denpasar, Badan Pusat Statistika Kabupaten Badung, Badan Pusat Statistika Kabupaten Gianyar, Pusat Statistika Kabupaten Tabanan, dan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar, Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan, Bapenda Kabupaten Badung, Bapenda Kota Denpasar, Dispenda Kabupaten Gianyar, Dispenda Kabupaten Tabanan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan alat analisis statistik yaitu, Analisis Regresi Linier Berganda. Hubungan variabel tersebut di jelaskan melalui kerangka konseptual yang ada.

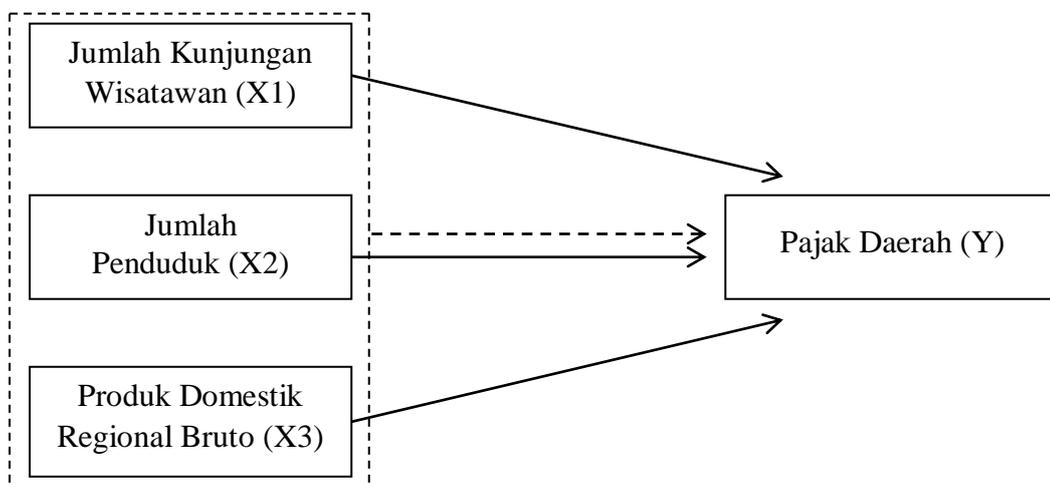
Pajak daerah merupakan salah satu sumber dari penerimaan pendapatan asli daerah (Kurnia, 2017:51). Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat (Sjafrizal, 2014). Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah merupakan kontribusi yang diberikan oleh pajak daerah yang terdiri dari beberapa pajak tergantung daerah yang bersangkutan terhadap penerimaan realisasi pendapatan asli daerah di daerah tersebut. Analisis trend akan memperlihatkan adanya kecenderungan yang meningkat atau menurun mengenai kontribusi pajak daerah pada pendapatan asli daerah dalam beberapa tahun.

Kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat berperan dalam memberi kontribusi bagi pendapatan asli daerah kabupaten/kota melalui pajak daerah. Menurut Rantetadung (2012) Kunjungan wisatawan memiliki pengaruh yang sangat berarti untuk pengembangan industri pariwisata dan pendapatan asli daerah. Menurut (Agustiningtyas, 2003) jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Banyaknya wisatawan yang berkunjung maka mendorong semakin besar kegiatan ekonomi di daerah yang bersangkutan, maka pajak yang dipungut menjadi semakin besar. Beberapa jenis pajak daerah yang dipungut dalam kaitannya dengan wisatawan yang berkunjung adalah pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran.

Menurut Saputra dkk (2012) Jumlah penduduk juga dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, karena seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk pada suatu daerah maka dapat berpotensi meningkatkan wajib pajak sehingga nantinya penerimaan pajak daerah juga memingkat. Sehingga dengan bertambahnya jumlah penduduk akan berdampak langsung pada penerimaan pajak daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Sania dkk (2018) jumlah penduduk merupakan variabel yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Lia Perdana (2013) menyatakan bahwa PDRB berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan penelitian yang dilakukan oleh Sania dkk (2018) PDRB memiliki pengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak daerah, dengan meningkatkan sektor – sektor yang ada dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maka dapat meningkatkan sumber dari penerimaan pajak daerah.



Gambar 4 Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini memiliki satu variabel dependen yaitu pajak daerah dan variabel independen terdiri dari jumlah kunjungan wisatawan, jumlah penduduk, produk domestik regional bruto. Maka dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

- Y : Pajak Daerah
- A : Harga konstan
- E : Error
- $\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien regresi
- X_1 : Jumlah Kunjungan Wisatawan
- X_2 : Jumlah Penduduk

X₃ : Produk Domestik Regional Bruto

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS. Model analisis linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh antar variabel bebas dengan variabel terikat yaitu pajak daerah. Hasil rangkuman analisis regresi dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Hasil Regresi Linier

Model Summary						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate		
1	.904 ^a	.816	.799	.15566		
a. Predictors: (Constant), PDRB (X3), Jumlah Kunjungan Wisatawan (X1), Jumlah Penduduk (X2)						
ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,450	3	1,150	47,461	.000 ^b
	Residual	,775	32	,024		
	Total	4,225	35			
a. Dependent Variable: Pajak Daerah (Y)						
b. Predictors: (Constant), PDRB (X3), Jumlah Kunjungan Wisatawan (X1), Jumlah Penduduk (X2)						
Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-,298	,071		-4,178	,000
	Jumlah Kunjungan Wisatawan (X1)	,046	,020	,208	2,267	,030
	Jumlah Penduduk (X2)	,266	,112	,250	2,377	,024
	PDRB (X3)	,026	,004	,618	6,647	,000
a. Dependent Variable: Pajak Daerah (Y)						

Berdasarkan Tabel 5 diatas, maka persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$\hat{Y} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

$$\hat{Y} = - 0,298 + 0,046 (X1) + 0,266 (X2) + 0,026 (X3)$$

SE	=	(0,020)	(0,112)	(0,004)	
t _{hitung}	=	2,267	2,377	6,647	
Sig	=	0,000	0,030	0,024	0,000
F	=	47,461			
Sig F	=	0,000			
R ²	=	0,816			

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Suyana, 2016). Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka nilai R² pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Suyana, 2016).

Berdasarkan hasil olahan data menggunakan SPSS, terlihat bahwa koefisien determinasi atau nilai R² sebesar 0,816 memiliki arti bahwa 81,6 persen variasi dari pajak daerah dijelaskan oleh variasi jumlah kunjungan wisatawan, jumlah penduduk, dan produk domestik regional bruto

sedangkan sisanya 18,4 persen dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini.

Uji Koefisien Regresi Secara Simultan(Uji F)

Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa tingkat signifikansi yang diperoleh adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan demikian H_0 ditolak, dapat disimpulkan bahwa variabel – variabel bebas yaitu jumlah kunjungan wisatawan, jumlah penduduk, dan produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah dan model regresi ini layak digunakan.

Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pajak Daerah

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel jumlah kunjungan wisatawan lebih kecil dari syarat signifikan yang ditemukan ini berarti variabel jumlah kunjungan wisatawan ini signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di wilayah Sarbagita, Bali. Berdasarkan nilai koefisien regresi dari jumlah kunjungan wisatawan bahwa adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, maka akan diikuti dengan kenaikan penerimaan pajak daerah dengan asumsi variabel lainnya konstan, karena koefisien regresi bertanda positif.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Tahwin (2013) menyatakan bahwa jumlah pengunjung objek wisata merupakan salah satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Rembang. Wisatawan baik domestik maupun mancanegara senantiasa akan membelanjakan uangnya yang dibawa untuk keperluan akomodasi, makan minum, atau membeli cendramata. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung akan mendorong

tumbuhnya kegiatan ekonomi di sekitar objek wisata dan secara tidak langsung ikut berkontribusi dalam peningkatan pajak daerah pada masing – masing daerah.

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pajak Daerah

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel jumlah penduduk lebih kecil dari syarat signifikan yang ditemukan ini berarti variabel jumlah penduduk dalam penelitian ini signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di wilayah Sarbagita, Bali. Berdasarkan nilai koefisien regresi dari jumlah penduduk bahwa setiap adanya peningkatan jumlah penduduk, maka akan diikuti dengan kenaikan penerimaan pajak daerah dengan asumsi variabel lainnya konstan, karena koefisien regresi bertanda positif.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi dkk (2014) yang menyatakan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Tulungagung dan penelitian yang dilakukan oleh Saputra dkk (2012) Jumlah penduduk juga dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Menurut Kristina (2010) Jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena disebabkan oleh bertambahnya potensi jumlah penduduk untuk memanfaatkan fasilitas – fasilitas yang dikenai pajak daerah. Jadi dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka potensi jumlah wajib pajak juga akan semakin besar, sehingga variabel jumlah penduduk berpengaruh pada penerimaan pajak daerah.

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pajak Daeah

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel produk domestik regional bruto lebih kecil dari syarat signifikan yang ditemukan ini berarti variabel produk domestik regional bruto dalam penelitian ini signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di wilayah Sarbagita, Bali. Berdasarkan nilai koefisien regresi dari produk domestik regional bruto

bahwa setiap adanya peningkatan produk domestik regional bruto, maka akan diikuti dengan kenaikan penerimaan pajak daerah dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ayugustiningtyas (2003) yang menyatakan bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Purnama dan Ilyas (2016) membuktikan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap pajak daerah di Provinsi Bengkulu, hal ini berarti bahwa meningkatnya PDRB akan berpengaruh meningkatnya penerimaan pajak daerah.

Hasil Analisis Tren

Menguji apakah ditahun-tahun yang akan datang pajak daerah pada masing-masing kabupaten/kota di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali mempunyai kecenderungan meningkat ataupun menurun akan diuji dengan analisis trend. Metode kuadrat terkecil paling umum dan lebih baik untuk menentukan garis trend. Pengolahan data menggunakan program SPSS (lampiran 7), menghasilkan persamaan sebagai berikut.

- 1) Kota Denpasar $Y' = 178,003 + 63,008X$
- 2) Kabupaten Badung $Y' = 533,892 + 362,622X$
- 3) Kabupaten Gianyar $Y' = 7,925 + 54,348X$
- 4) Kabupaten Tabanan $Y' = 21,908 + 11,912X$

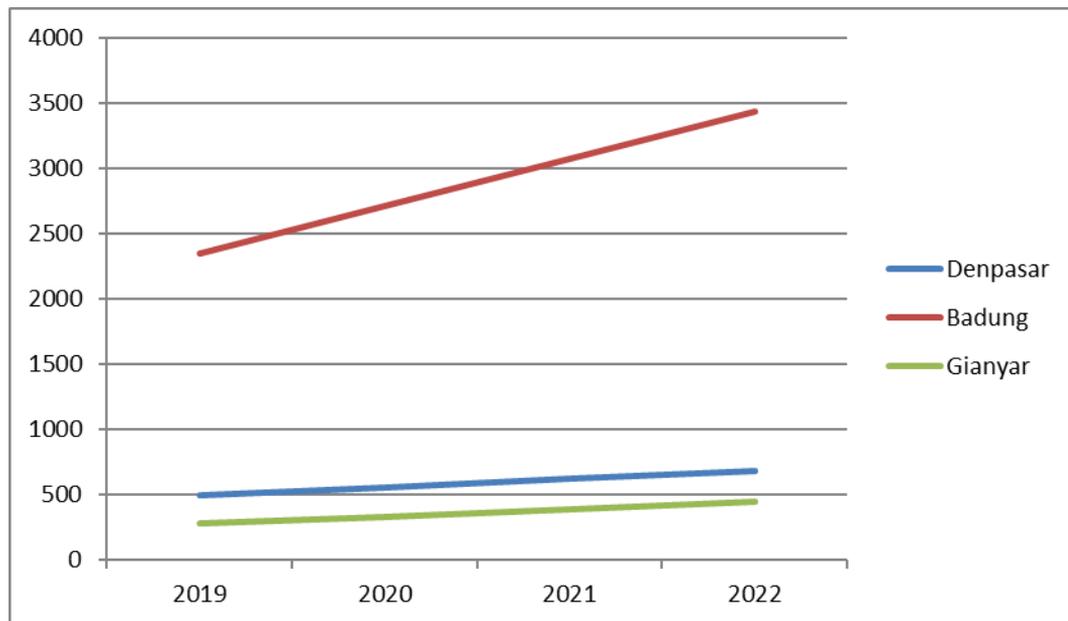
Tabel 6 Tren Pajak Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali Tahun 2019 – 2023 (Miliar Rupiah)

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Denpasar	493,043	556,051	619,059	682,067	745,075
Badung	2347,002	2709,624	3072,246	3434,868	3797,490
Gianyar	279,665	334,013	388,361	442,709	497,057
Tabanan	81,468	93,38	105,292	117,204	129,116

Sumber: data diolah dari persamaan tren

Jadi dapat disimpulkan bahwa tren pajak daerah pada masing-masing kabupaten/kota di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali mengalami peningkatan pada tahun 2019 sampai 2023 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa ramalan tren pajak daerah Kabupaten Badung memiliki rata-rata peningkatan pajak daerah tertinggi diantara kabupaten/kota di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali, dengan peningkatan sebesar Rp 362,62 milyar per tahun. Peningkatan yang drastis terjadi dalam penerimaan pajak daerah di Kabupaten Badung disebabkan oleh Kabupaten Badung memiliki sektor unggulan yaitu sektor penyedia akomodasi dan makan minum (Indra dan Yadnya, 2018). Sektor tersebut secara langsung akan dapat meningkatkan pajak hotel dan pajak yang merupakan bagian dari pajak daerah.

Ramalan tren Kabupaten Tabanan memiliki rata – rata peningkatan pajak daerah yang terendah diantara kabupaten/kota di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali, dengan peningkatan Rp 11,912 milyar per tahun. Namun apabila Kabupaten Tabanan dapat meningkatkan sumber penerimaan pajak daerah, maka ramalan tren pajak daerah bisa lebih tinggi dari hasil proyeksi. Begitupun dengan Kabupaten Badung akan tetap menjadi kabupaten dengan penerimaan pajak daerah tertinggi di masa depan, jika dapat mempertahankan sumber penerimaan pajak daerah di daerahnya.



Gambar 5 Tren Pajak Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali Tahun 2019 - 2023

SIMPULAN

- 1) Secara simultan jumlah kunjungan wisatawan (X_1), jumlah penduduk (X_2), dan produk domestik regional bruto (X_3) berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Hal ini dibuktikan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($<0,05$) maka H_0 ditolak. Semua variabel dalam penelitian ini mempengaruhi penerimaan pajak daerah di wilayah Sarbagita Provinsi Bali.
- 2) Secara parsial jumlah kunjungan wisatawan (X_1), jumlah penduduk (X_2), produk domestik regional bruto (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali, dibuktikan dengan nilai sig. 0,000 ($<0,05$) maka H_0 ditolak.
- 3) Tren (kecenderungan) pajak daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali mengalami peningkatan di tahun 2019-2023, dengan asumsi jumlah kunjungan wisatawan, jumlah penduduk, dan produk domestik regional bruto meningkat. Kabupaten Badung memiliki

rata-rata peningkatan pajak daerah tertinggi, sedangkan kabupaten Tabanan memiliki rata-rata peningkatan pajak daerah terendah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali.

SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah kunjungan wisatawan dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh yang positif terhadap pajak daerah, maka perlu upaya – upaya untuk menarik wisatawan untuk berkunjung ke wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui pembenahan tempat – tempat wisata, pembangunan tempat – tempat wisata baru, melakukan promosi, melakukan kerja sama dengan biro perjalanan, dan lain – lain.
- 2) Jumlah penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah salah satunya melalui pajak hiburan. Agar lebih signifikan, diharapkan masing – masing kabupaten/kota di wilayah Sarbagita dapat memajukan kesejahteraan penduduk dengan mengurangi pengangguran agar masyarakat dapat lebih produktif dalam membayar pajak.
- 3) Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Agar lebih signifikan perlu ditingkatkan sektor – sektor Produk Domestik Regional Bruto baik yang berhubungan langsung maupun tidak yang berhubungan dengan penerimaan pajak. Sehingga dapat menarik investor untuk membangun usaha di wilayah Sarbagita Provinsi Bali.

REFERENSI

Adriani, Evi dan Indah Handayani, Sri. 2008. Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 8, No.

- Andreas Buehn, Christian Lessmann, dan Gunther Markwardt. 2013. Decentralization and The Shadoweconomy: Oates meets Allingham – Sandmo, *Applied Economics*, Vol. 45, pp: 2567–2578.
- Ardahaey, Fateme Tohidy. 2011. Economic Impacts of Tourism Industry. *International Journal of Business and Management*, Vol. 6 (8). pp: 206 – 2015
- Bendesa, I.K.G dan Sukarsa, I. M. 2012. Economic Survey of Bali, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 16 (2), pp: 31-53.
- Blane D. Lewis (2003): Tax And Charge Creation By Regional Governments Under Fiscaldecentralisation: Estimates And Explanations, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39:2, 177-192.
- Dwi Saputra, Andys, Sudjana, Nengah, dan Djudi, Muchammad. Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah (studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Perpajakan*, Vol. 3, No.1
- Eko Caraka, Rezzy. 2019. Pemodelan Regresi Panel pada Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Dana Alokasi Umum (DAU). *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 12 (1), pp: 55-61.
- Gde Ana Pertiwi, Ni Luh. 2017. Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Retribusi Obyek Wisata dan PHR Terhadap PAD Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3 [3], pp: 115 – 123.
- Gustav Ranis & Frances Stewart. 1994. Decentralisation in Indonesia, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 30(3), pp:41-72.
- Indra Perdana P, Putu dan Yadnya, I Putu. 2018. Analisis Sektor Unggulan Perekonomian di Kabupaten/Kota Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. *E-Jurnal Managemen Unud*, Vol. 7, No. 10, pp: 5657-5685.
- Irawan, Andi. 2015. Regional Income Disparities in Indonesia: Measurements, Convergence Process, and Decentralisation, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 51(1), pp: 148 - 149.
- James Alm, Robert H. Aten and Roy Bahl. 2001. Can Indonesia Decentralise Successfully? Plans, Problems And Prospects. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 37 (1), pp: 83–102.
- Kaur, Manjinder dan Singh, Lakhwinder. 2016. Knowledge In The Economic Growth Of Developing Economies, *African Journal of Science, Technology. Innovation and Development*. Vol 8(2), pp: 205-212.
- Kurniawan, Robi dan Managi, Shunsuke. 2018. Economic Growth and Sustainable Development in Indonesia: An Assessment, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol 54(3), pp:339-361.

- Kusuma, Hendra. 2016. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 9 [1], pp: 1 - 11. ISSN: 2301 – 8968.
- Lewis, Carol W. and W. Bertley Hildreth. 2012. *Budgeting: Politics and Power, 2nd ed.* New York: Oxford University Press.
- Muhammad Fajrii, Arman Delis dan Yohanes Vyn Amzar. 2016. Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9 [2] pp: 99 - 107, ISSN : 2301 – 8968.
- Muhamad Taufik, dkk. 2014. Pengaruh Investasi Dan Ekspor Terhadap Perumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 7 (2). Hal : 90-101.
- Nick Devas. 1988. Local Taxation in Indonesia: Opportunities for Reform, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 24(2), pp: 58-85
- Oates, W.E. 1993. Fiscal Decentralization and Economic Development, *National Tax Journal*, Vol. 46, No. 2, pp: 237 - 243.
- Permadi, Yudistira Andi. 2018. Growth Inequality, and Poverty: An Analysis of Pro-Poor Growth in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 11, No. 2, pp: 216 - 233.
- Purnama Sari, Dian dan Ilyas, Fitrawati. 2016. Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Bengkulu, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 6, No. 1, pp: 75-84.
- Rantetadung, M. 2012. Analisis Pengaruh Dukungan Pemerintah dan Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nabire. *Jurnal Agroforensi*. Vol. 7 (1), pp: 25 – 32.
- Randinelli, D. A., McCullough, J. S., & Johnson, R. W. 1989. Analysing Decentralization Policies in Developing Countries: a Political-Economy Framework. *Development and Change*, Vol 20(1), pp: 57–87.